

POLIGAMI KAUM ELIT AGAMA ISLAM
(Menimbang Plus-Minus Praktik Poligami Kaum Elit Agama bagi Masyarakat)

Gatot Suhirman

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

Email: gatotsuhirman@yahoo.com

Abstark: polygamy practiced by religious figures has broad impacts for society. On the one hand, this could justify that polygamy is an ideal type of marriage for people, especially for those who support this marriage. On the other hand, polygamy by religious figures by become a bit blow for those who oppose polygamy. what are the reasons for which the religious figure practice polygamy? do they realize their polygamous marriage could and danger social justice, especially for woman? this paper examines these question, that is the broader impact of polygamy for society.

Abstrak: Poligami kaum elit agama bagaikan pisau bermata dua bagi masyarakat. Di satu sisi, tindakannya dapat dipakai sebagai legitimasi untuk semakin melanggengkan institusi poligami sebagai pilihan bentuk perkawinan bagi kelompok yang setuju. Di sisi lain, poligami yang dipraktikkan kaum elit justru merupakan “pukulan hebat” bagi sebagian kalangan yang tidak sepakat jika poligami dipraktikkan. Tidak hanya itu, pertanyaan pun diajukan, apakah memang seharusnya para elit agama semisal kyai, ustadz, dan lain sebagainya memberikan contoh yang hanya mempertimbangkan kemaslahatan pribadi (berpoligami) tanpa “mengindahkan” perasaan sosial masyarakat akar rumput yang terlukai, khususnya kaum perempuan. Dampak plus-minus poligami kaum elit bagi masyarakat inilah yang menjadi tema sentral tulisan ini.

Keywords: *Poligami, kaum elit agama, dampak plus-minus.*

A. Pendahuluan

Diskursus seputar wacana hak-hak dan kesetaran gender bagi wanita selalu menarik untuk dikaji, khususnya di negara-negara Muslim. Upaya peningkatan status wanita terus diupayakan terutama dalam wacana pembaruan hukum keluarga Muslim. Hal ini penting dikemukakan, karena stigma yang selalu muncul adalah kondisi wanita yang selalu termarginalkan dan mengalami subordinasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Faktor penyebab munculnya masalah ini erat kaitannya dengan konstruksi hukum Islam yang telah tertanam dalam struktur masyarakat Muslim yang menampilkan bias patriarkhi.

Salah satu isu yang paling mengemuka dan banyak mendapat sorotan dari kalangan feminis adalah masalah poligami. Bentuk perkawinan semacam ini dalam hukum Islam juga selalu mengundang perdebatan di kalangan pemikir Muslim dari dulu hingga sekarang. Bahkan perdebatan tersebut disinyalir tidak akan pernah berakhir dikarenakan poligami tidak hanya mempunyai legalitas hukum, tetapi juga didukung oleh tradisi yang ada di masyarakat.¹

Bagi mereka yang menerima poligami beralasan, bahwa poligami dapat menjadi solusi alternatif perzinahan (prostitusi), mengangkat dan memberdayakan wanita. Di samping juga faktor biologis, karena kemampuan seksual laki-laki berlangsung sampai tua sedangkan secara demografi jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki.² Karena itu, mayoritas ulama klasik dan abad pertengahan berpendapat bahwa poligami boleh secara mutlak maksimal empat orang istri. Sementara mayoritas pemikir Muslim kontemporer dan perundang-undangan Muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu. Bahkan ada yang mengharamkan poligami secara mutlak, karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Islam dan tidak sesuai dengan kesetaraan gender.

Namun, ada fenomena baru yang berkembang di masyarakat yang justru menarik untuk disorot lebih lanjut terkait dengan diskusi tentang poligami tingkat lanjut dewasa ini, yakni poligami tingkat elit agama di masyarakat Islam, khususnya di Indonesia. Perbincangan tentang tema ini semakin menarik dikarenakan praktik poligami yang sementara dilakukan oleh kyai, ustadz yang menjadi panutan

¹Hamim Ilyas, "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam", dalam Musawa, Vol. I No. I, Maret 2002, hlm. 23. Baca juga, Wardian, "Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Tunisia (Studi atas Istinbath Hukum Larangan Poligami)", Tesis, tidak diterbitkan, pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006.

²Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 118-119.

masyarakat dalam beragama justru menimbulkan kontroversi di tengah-tengah maraknya diskusi tentang gender dan relasi suami istri yang sejajar.

Bagi yang setuju dengan poligami, tindakan para elit agama (kyai, tuan guru atau ustadz, misalnya) dapat dijadikan sandaran pembenaran yang kukuh untuk ikut berpoligami. Sebaliknya, bagi yang tidak setuju, poligami tokoh panutan mereka justru membuat mereka kecewa dan menjadi “pukulan hebat” bagi mereka. Sebab, orang yang mereka idolakan justru berbalik melukai perasaan mereka.

Tulisan ini sendiri berupaya menjelaskan praktik poligami yang dilakukan oleh para elit agama tadi seraya melakukan analisis terbuka untuk memaparkan dampak plus-minusnya bagi masyarakat Islam kebanyakan.

B. Poligami dalam Islam: Sejarah Pengantar Wacana

1. Islam dan Poligami: Legitimasi Nass dan Latar Historis

Secara etimologi, poligami berasal dari kata Yunani, yakni poli atau polus yang berarti banyak dan gamein, yang artinya kawin atau perkawinan. Sementara dalam bahasa Arab, poligami disebut ta’addud Az-zaujat (berbilangnya pasangan).³ Di Indonesia sendiri poligami disebut dengan istilah permaduan.⁴ Karena itu, secara terminologis poligami berarti seorang pria memiliki beberapa istri pada waktu yang bersamaan. Namun dalam Islam, poligami dibatasi paling banyak empat orang istri.⁵ Adapun ayat yang lumrah menjadi landasan atau dasar poligami dalam Al-Qur’an adalah:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا⁶

Sementara hadis yang berbicara tentang poligami adalah:

³Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113.

⁴Pius A. Partanto dan Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arloka, t.t.), 606.

⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat I, Cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 131.

⁶Al-Nisā (4): 3.

ان غيلان بن سلامة الثقفي اسلم وله عشرة نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامرہ النبي صل الله عليه وسلم ان يتخير اربعا منهن ^٧

قال وهب الاسد قال اسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فقال النبي صلعم اختر منهن اربعا ^٨

ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لرجل من شاقف اسلم وعنده عشرين نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن ^٩

Terdapat pula ayat-ayat lain yang bisa membantu dalam memahami poligami secara komprehensif, antara lain:

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وءاتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ^{١٠}

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيما ^{١١}

⁷Hadis ini diceritakan dari Ibn Umar dari Salim bin 'Abdillah dari az-Zuhri dari Ma'mar dari Sa'id bin Abi 'Arubah dari 'Abdah dari Hannad. Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa Surah, al-Jami as-Shahih (Sunan at-Tirmizi) (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) III: 435. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, Ahmad, Ibn Hibban, Syafi'I, dan Baihaqi yang menyatakan bahwa hadis ini sebagai hadis sahih.

⁸Hadis ini diceritakan dari Musaddad Ibn 'Umairah dari Haris bin Qais dari Haumaidah bin asy-Syarmadal dari Ibn Abi Laila dari Husyaim dari Wahab bin baqiyah dari Husyaim dari Musaddad. Abu Dawud Sulaiman bin al-'Asy'as as-Sajastani, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 272.

⁹Hadis ini bersumber dari Ibnu Syihab, dalam at-Tirmiz, Sunan at-Tirmiz, «Kitab an-Nikah», hadis no. 1047 dan «Kitab al-Buy», hadis no. 1127; Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, «Kitab an-Nikah», hadis no. 1943 dan 1953.

.Al-Nisà (4): 1-2

١٠

¹¹Al-Nisà (4): 129.

Adanya kenyataan bahwa terdapat beberapa nass yang berbicara tentang poligami, yakni al-Nisā (4): 3, yang dihubungkan dengan ayat sebelumnya, al-Nisā (4): 1-2 dan ayat sesudahnya, al-Nisā (4): 129, menunjukkan adanya korelasi positif dalam mengkaji poligami dalam Islam. Berdasarkan kajian yang ada menunjukkan bahwa ada kondisi tertentu yang menjadi sebab kebolehan seseorang melakukan poligami.

Pembacaan ayat-ayat poligami menjadi satu kesatuan utuh dalam pembahasannya akan menuntun kita pada pandangan bahwa Al-Qur'an berbicara mengenai poligami justru berkaitan dengan konteks pengasuhan anak yatim perempuan yang sudah cukup umur atau dewasa. Sementara, walinya enggan mengembalikan harta yang dimiliki oleh para anak yatim tersebut kepadanya. Sebagai solusi, para walinya dianjurkan untuk menikahi perempuan tersebut agar mereka tetap memelihara dan menggunakan harta yang berada dalam perwaliannya. Karena itu, persoalan dibolehkannya poligami berdasarkan al-Nisā (4): 3 merupakan jawaban terhadap masalah spesifik-kasuistik tersebut.¹² Karena itu, nass ini masuk dalam kategori kelompok nass kasuistik atau dalam istilah Asghar Ali Engineer sebagai ayat kontekstual,¹³ yang sifatnya temporal untuk menjawab masalah yang muncul pada saat itu.

Aspek terpenting lainnya yang harus dicermati ketika membaca dan memahami al-Nisā (4): 3 adalah konteks historisnya atau meneliti konteks turunnya wahyu (sabab an-nuzul) ayat tersebut. Secara umum, ayat dalam Surat al-Nisā ini turun dalam rentang waktu sesudah perang Uhud pada tahun ketiga hijriyah hingga sesudah tahun kedelapan hijriyah.¹⁴ Ketika itu, akibat perang Uhud rasio jumlah perempuan janda dan anak-anak perempuan menjadi yatim semakin meningkat sebagai akibat dari tewasnya 70 orang dari 700 orang laki-laki.

Dalam konteks sosiologis, saat itu jalan yang terbaik untuk mengatasi persoalan janda dan anak yatim, sebagai persoalan sosial-kemanusiaan adalah dengan memberi ruang bagi laki-laki untuk mengawini para janda dan anak yatim sampai empat, dengan syarat memperlakukan mereka secara adil. Ini merupakan jalan terbaik yang paling mungkin dilakukan saat itu¹⁵ untuk menyelamatkan

¹²Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Tazzafa Press, 2004), 315.

¹³Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994), 72.

¹⁴Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Cet. IV (Beirut: Dar al-'Arabiyyah, 1967), IV: 189.

¹⁵Maulana Wahidudin Khan, *Poligamy and Islam* (Delhi: The Islamic Centre, 1976), 10-11. M. Matheruddin Siddiqi, *Women in Islam* (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1993), 110.

mereka dari predikat “janda” dan sekaligus menjadi solusi terhadap praktik perzinahan, prostitusi, pergaulan bebas dan viktimasi dalam masyarakat.¹⁶

Sementara jika dilihat dari sabab an-nuzul khusus (mikro), ada sejumlah riwayat yang menceritakan dibalik turunnya ayat dari surat al-Nisā ini. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwasanya Urwah Ibn Zubair bertanya kepada bibinya Aisyah tentang ayat ini. Aisyah menjawab bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang anak yatim perempuan yang masih dalam tanggungan walinya. Anak perempuan yatim tersebut kebetulan cantik dan kaya. Hal ini kemudian membuat walinya tertarik untuk menikahnya. Padahal wali tersebut bukanlah orang yang biasa berbuat adil. Karena itu, para sahabat kemudian melarangnya untuk menikahi anak yatim tersebut, kecuali sanggup berlaku adil kepadanya dan memberikan maskawin sebagaimana yang berlaku.¹⁷

Hal terpenting yang tidak boleh dilupakan dalam memahami konsep poligami secara utuh adalah dengan mengaitkannya dengan kondisi dan tradisi yang terjadi pada masa sebelum Islam datang. Karena secara historis, praktik poligami merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua bangsa-bangsa di Barat dan di Timur jauh sebelum Islam datang. Didukung legitimasi perbuatan raja-raja yang melembagakan pernikahan dengan lebih dari seorang istri, maka poligami menjadi pemandangan yang biasa di dalam masyarakat. Karena itu, tradisi pra-Islam adalah kebiasaan menikahi wanita yang tidak terbatas. Seorang laki-laki boleh menikahi wanita tanpa batas.¹⁸

Adanya bentuk perkawinan tersebut merupakan implikasi dari rendahnya kedudukan mereka dalam masyarakat Arab ketika itu, sehingga wanita pada masa pra-Islam hanya sekadar pemuas nafsu birahi laki-laki. Status mereka dianggap sama dengan harta benda yang lain, yang dapat diperjual-belikan dan diwariskan kepada orang lain.

Praktik semacam inilah yang ingin diperbaharui dan dihapus oleh Islam dengan membatasi boleh menikahi maksimal empat wanita saja, namun dengan memenuhi persyaratan tertentu, yakni mampu dan dapat berlaku adil di antara para istrinya. Disamping ingin menghapus kebiasaan masyarakat Arab yang lain berkenaan dengan keluarga, lebih khusus bagi istri (wanita) adalah kebiasaan

¹⁶Safia Iqbal, *Women and Islamic law* (Delhi: ada Publisher and Distributors, 1994), 171.

¹⁷Imam Abi Abdillah Muhammad bin ‘Isma’il bin Ibrahi Ibn Mugirah bin barzabah al-Bukhari al-Ja’fari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), V: 116-117.

¹⁸J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 49. Juga, Sayyid Amir Ali, *The Spirit of Islam: a History of Evolution and Ideal of Islam with a Life of a Prophet* (India: Idarah Adabiyah, 1978), 225.

mengubur anak wanita. Islam datang untuk mengangkat harkat martabat wanita dengan meniadakan diskriminasi yang dilakukan secara gradual, yang pada akhirnya bermuara pada kesetaraan bagi masing-masing pihak, baik laki-laki maupun wanita. Hal inilah yang dicanangkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam membentuk dan membina masyarakat Islam. Menghormati kaum perempuan merupakan ajaran Islam yang sebenarnya.

Berdasarkan gambaran di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa poligami merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat luas dari masa ke masa. Islam datang untuk memperketat kebolehan poligami bukan saja dengan jumlah terbatas, akan tetapi juga sebagai sarana untuk mengatasi persoalan sosial menyangkut anak yatim dan janda. Dari sudut pandang ajaran Islam, perkawinan secara poligami walaupun diperbolehkan, namun tidak dianjurkan melaksanakannya. Pembolehan poligami lebih disebabkan untuk membatasi praktik-praktik pemilikan perempuan yang melampaui batas pada masa dulu sebelum Islam datang. Di samping poligami dianggap sebagai solusi alternatif pada kasus tertentu dan karena itu, sifatnya kondisional.¹⁹

2. Perkawinan dan Tujuan Perkawinan dalam Islam

Melalui penelusuran seluruh nass yang berbicara tentang poligami lengkap dengan sebab turunnya dan bagaimana kondisi wanita pra-Islam, sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa status poligami yang dilakukan ketika itu disebabkan adanya tuntutan tertentu. Lebih jauh, pembahasan menyeluruh tentang poligami mengharuskan pula untuk dihubungkan dengan nass-nass yang berkaitan dengan perkawinan, minimal nass-nass tentang status dan tujuan perkawinan. Hal ini dilakukan sebagai implikasi memahami Al-Qur'an secara holistik dalam rangka menemukan prinsip perkawinan yang ideal dalam Islam.

Kedudukan akad nikah menurut Islam dipandang sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghaliza*) sebagaimana diproklamirkan dalam al-Qur'an. Kata *mitsaqan ghaliza* dalam Al-Qur'an dapat ditemukan hanya pada tiga tempat, yakni, (i) surah al-Ahzab (33): 7; (ii) al-Nisā (4): 154; dan (iii) al-Nisā (4): 21. pada ayat al-Ahzab (33): 7, kata *mitsaqan ghaliza* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah Nabi. Sementara pada al-Nisā (4): 154 kata *mithaqan ghaliza* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang Yahudi. Kemudian pada surah al-Nisā (4): 21 kata *mitsaqan ghaliza* digunakan untuk menunjuk perjanjian

¹⁹ahmat Hakim, Hukum perkawinan, 113.

perkawinan (nikah). Berdasarkan ungkapan-ungkapan tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami-istri diumpamakan dengan kesucian hubungan Allah dengan para nabi atau rasul-Nya.

Berkaitan dengan tujuan perkawinan, ada tiga tujuan umum dari perkawinan yang diamanatkan Al-Qur'an, yakni pertama, sarana reproduksi dalam rangka tujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi. Hal ini dapat ditemukan misalnya dalam surah al-Shura (42): 11, ar-Rum (30): 21, al-Tariq (86): 6-7, dan al-Nisā (4): 1. Tujuan kedua dari pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan seksual, yang dapat dilihat dalam surah al-Ma'arij (70): 29-31, al-Mu'minun (23): 5-7, al-Baqarah (2): 187 dan 223, serta an-Nur (24): 33. Tujuan ketiga adalah memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang, yang misalnya dapat dilihat dalam surah ar-Rum (30): 21.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkawinan adalah ikatan atau hubungan yang suci antar dua pasangan yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk memperoleh tujuan ikatan perkawinan tersebut, yakni untuk meneruskan generasi, sama-sama memenuhi hubungan seksual, yang pada akhirnya menciptakan sebuah keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang. Bukan saja semata-mata bagi kedua pasangan, tetapi juga dirasakan oleh anak-anak mereka. Implikasi dari pemahaman seperti ini menghasilkan kesimpulan bahwa asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Poligami yang diproklamirkan al-Nisā (4): 3 harus dipahami lengkap dengan sebab turun mikro dan makronya, yakni praktik yang dapat dilakukan dalam kondisi dan dengan syarat-syarat tertentu.

C. Poligami dalam Wacana Perdebatan

Kenyataan menunjukkan bahwa persoalan poligami merupakan bentuk perkawinan dalam Islam yang selalu mengundang perdebatan di kalangan pemikir Muslim dari generasi ke generasi hingga sekarang. Perdebatan ini tidak akan pernah berakhir dikarenakan poligami tidak hanya mempunyai legalitas hukum, tetapi juga didukung oleh tradisi yang ada di masyarakat.²⁰ Adanya kecenderungan

²⁰Hamim Ilyas, "Poligami...", 23.

psikologi laki-laki untuk menjadi “penguasa”,²¹ semakin menambah maraknya praktek poligami di masyarakat.

Adanya pandangan poligami dapat menjadi solusi alternatif perzinahan (prostitusi), mengangkat dan memberdayakan perempuan seringkali dilontarkan sebagai argumen untuk mendukung praktik poligami di masyarakat Islam. Di samping juga faktor biologis karena kemampuan seksual laki-laki berlangsung sampai tua sedangkan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki (demografi).²² Hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama klasik dan pertengahan bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan Muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat ketat dan dalam kondisi tertentu. Bahkan ada beberapa negara muslim yang mengharamkan poligami secara mutlak karena poligami dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Islam dan tidak sesuai dengan tujuan ideal perkawinan Islam yang menjunjung tinggi asas kesetaraan jender antara suami istri. Poligami bahkan dianggap sebagai kezaliman pada pihak istri. Oleh karena itu, perdebatan seputar status poligami akan semakin menarik jika beberapa argumen baik yang pro maupun yang kontra disajikan secara bersamaan. Ini dilakukan demi usaha untuk saling menghargai masing-masing pemikiran yang ada setelah masing-masing pandangan diperbandingkan.

Dimulai dari kitab al-Mabsūt yang ditulis oleh al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi, tidak ditemukan secara tegas penjelasan mengenai asas perkawinan. Dalam kitab ini hanya ditulis bahwa seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap istrinya.²³ Keharusan berlaku adil ini berdasarkan surat al-Nisā (4): 3; dan hadis dari Aisyah yang menceritakan perlakuan yang adil dari Nabi kepada para istrinya,²⁴ ditambah dengan ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada para istrinya.²⁵

²¹Lebih jauh baca Aksin Wijaya, “Memahami Kembali Wahyu Tuhan (Pembacaan Hermeutik atas Ayat-ayat Gender)”, tesis sudah diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004, 150-151.

²²Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan, 118-119.

²³Syams ad-Dīn as-Sarakhsī, al-Mabsūt (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1989), V: 217.

²⁴ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسمة بين نسائه وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تاخذني فيما تملك. Dalam teks lain, kata تاخذني diganti dengan تلمني. Hadis ini bersumber dari Aisyah, dalam Abū Daud, Sunan Abū Daūd, “Kitāb al-Nikāh” hadis no. 1882; at-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī, “Kitāb an-Nikāh”, hadis no. 1059.

²⁵ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له زوجتان فمال الي احدهن في القسم جاء يوم القيمة واحد شافه مائلا. Hadis ini bersumber dari Abū Hurairah. Dalam kitab-kitab hadis kata زوجتان diganti dengan امرأتان. Hal ini dapat dilihat dalam at-Tirmizī, Sunan at-Tirmizī, “Kitāb an-Nikāh”, hadis no. 1060;

Dalam kitab al-Umm, karangan imam asy-Syāfi'i menyatakan bahwa Islam membolehkan suami mempunyai istri maksimal empat orang, berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi. Landasan yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah al-Nisā (4): 3, yang membolehkan beristri empat,²⁶ kemudian al-Ahzab (33): 50 tentang rotasi atau giliran (pembagian malam) terhadap istri, nafkah dan waris-mewarisi,²⁷ dan al-Mu'minun (23): 5-6,²⁸ berhubungan dengan halalnya menikahi wanita merdeka dan budak serta boleh melakukan aktivitas senang-senang (talazuz) dengan mereka, tetapi tidak boleh dengan binatang.²⁹

Dasar hadis yang digunakan oleh imam Syafi'i untuk menunjukkan bolehnya poligami maksimal empat adalah berdasarkan cerita seorang pria bangsa Ṭaqif yang masuk Islam dan mempunyai istri sepuluh. Ketika Nabi mengetahui orang itu memiliki istri sepuluh, Nabi memerintahkan supaya mempertahankan empat dan menceraikan yang lainnya.³⁰

Menurut Syafi'i, tuntutan berbuat adil di antara para istri lebih cenderung kepada urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau di siang hari. Adapun tuntutan ini didasarkan pada prilaku Nabi dalam berbuat adil kepada istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberi nafkah. Begitu pula dalam kitab al-Muwatta', karya Imam Malik membolehkan poligami dengan maksimal empat, berdasarkan hadis yang sama, yakni kasus seorang pria bangsa Tsaqif yang masuk Islam dan mempunyai istri sepuluh dan Nabi memerintahkannya hanya mempertahankan maksimal empat, sementara yang lain harus diceraikan.³¹ Sementara Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali berpendapat bahwa seorang suami hanya boleh menikahi wanita maksimal empat. Hal ini berdasarkan al-Nisā (4): 3, dan kasus Ghaylan bin Salamah, serta kasus Naufal bin Mu'awiyah.

²⁶«.....dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.»

²⁷«....Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempatan bagi kamu..»

²⁸«dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.»

²⁹Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, edisi al-Muzna (ttp.: tp., t.t.), V: 129.

³⁰ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من شاقف اسلم وعنده عشرين نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن . Hadis ini bersumber dari Ibnu Syihab, dalam at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, «Kitab al-Nikah, hadis no. 1047

³¹Malik bin Anas, al-Muwatta, edisi Muhammad Fuad al-Baqa (ttt.: tp., tt.), III: 362, bab "Jami at-Talaq", hadis no. 76.

Berdasarkan keterangan di atas, tuntutan harus berbuat adil di antara para istri hanya berhubungan dengan urusan materi atau fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada perilaku Nabi dalam berbuat adil kepada para istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah. Akan tetapi tidak menyinggung persoalan keadilan tentang hati. Dalam hal ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa berlaku adil tentang masalah hati hanya Allahlah yang mengetahuinya. Karena mustahil bagi seorang suami dapat berlaku adil kepada istrinya seperti yang diisyaratkan pada al-Nisā (4): 129.³²

Aplikasi dari sifat adil yang dituntut Al-Qur'an, juga dapat ditemukan dalam surah Yunus (10): 67, dan al-Rum (30): 21. Berdasarkan kedua ayat ini seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang wajib membagi malam secara adil. Suami tidak boleh masuk kamar istri yang bukan gilirannya kecuali karena ada kepentingan. Jika ada kepentingan, suami boleh masuk hanya untuk memenuhi kepentingan tersebut, misalnya istri itu sakit. Tetapi boleh mengunjunginya pada siang hari saja sedangkan pada malam hari tidak boleh, kecuali jika istri itu meninggal, maka boleh mengunjunginya di malam hari. Dengan catatan, sisa malamnya tetap menjadi milik istri yang mempunyai giliran. Namun demikian, jika terjadi pelanggaran pun, suami tidak dijatuhi hukuman kifarat.

Dari beberapa pendapat yang berkembang dari para imam mazhab tersebut hanya imam Syafi'i yang menghubungkan al-Nisā (4): 3 dengan al-Nisā (4): 129, di mana ayat kedua menurut sebagian pemikir Muslim merupakan jawaban terhadap ayat pertama. Walaupun demikian, imam Syafi'i sendiri tidak sependapat dengan pandangan tersebut dalam memahami posisi poligami dalam Islam. Meskipun imam Syafi'i menghubungkan al-Nisā (4): 3 dengan ayat sesudahnya, 129, bahkan dengan sejumlah ayat lain, tetapi tidak tampak menjadikannya sebagai satu kesatuan pembahasan yang utuh dan menyatu. Di samping itu, para imam mazhab fiqh tersebut tidak satupun yang menyertakan konteks sebab turunnya ayat. Demikian juga, tidak ada yang menghubungkannya dengan pembahasan ayat sebelumnya, yakni al-Nisā (4): 1 dan 2. Karena itu, pembahasan para imam mazhab fiqh masih literalis dan ahistoris dalam memahami nass-nass poligami.

Sementara itu, status poligami dalam pandangan pemikir muslim kontemporer, diantaranya Quraish Syihab, misalnya, mengatakan bahwa poligami

³²«Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu, sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang».

boleh tapi dengan syarat-syarat yang tidak ringan. Alasan yang ia gunakan adalah al-Nisā (4): 3 dan 129, dan hadis Nabi yang memerintahkan Ghailan bin Salamah yang memiliki sepuluh istri ketika masuk Islam disuruh memilih empat orang saja.³³ Quraish Shihab menyebutkan bahwa sebab turunnya al-Nisā (4): 3 adalah apa yang diuraikan Aisyah r.a. menyangkut sikap sementara orang yang ingin mengawini anak-anak yatim yang kaya dan cantik, sedangkan ia masih berada dalam pemeliharaan orang tersebut sebagai walinya yang dinilai tidak berkeinginan untuk memberikan mas kawin sebagaimana semestinya dan memperlakukan anak yatim tersebut dengan tidak adil. Karena itu, turunnya ayat ini dengan demikian bertujuan melarang perilaku tersebut. Sementara penyebutan dua, tiga atau empat dalam ayat ini pada hakikatnya adalah tuntutan berlaku adil kepada para anak yatim tersebut.³⁴

Lebih lanjut, Quraish Syihab menjelaskan bahwa pembahasan poligami dalam Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari perspektif pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Ia mencontohkan dengan kemungkinan terjadinya kemandulan bagi istri, terjangkit penyakit parah, dan karena alasan atau kondisi lainnya. Oleh karena itu, menutup sama sekali pintu poligami yang telah dibuka Syariat Islam, akan mengantarkan pada maraknya perkawinan sirri (perkawinan yang dirahasiakan).³⁵ Keadilan yang diisyaratkan dalam poligami berdasarkan al-Nisā (4): 3, menurut Quraish Syihab, adalah keadilan material. Sedangkan al-Nisā (4): 129 adalah keadilan immaterial (cinta). Maka tidaklah tepat jika ini dijadikan sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya. Berdasarkan alur berpikir seperti ini, maka pandangan Quraish Shihab tentang hubungan al-Nisā (4): 3 dan 129 sejalan dengan pandangan imam Syafi'i, di mana tuntutan keadilan untuk bolehnya poligami adalah pada hal-hal yang berhubungan dengan materi yang dapat diukur dengan angka, bukan pada perasaan hati dan cinta yang tidak mungkin terukur.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Asghar Ali Engineer, bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang poligami harus dilihat dari konteksnya. Asghar berpendapat, penekanan al-Nisā (4): 1, 2 dan 3 bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak-anak yatim. Maka konteks ayat-ayat

³³Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 199.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Karena ayat ini bukan merujuk pada satu hal yang umum, tetapi terhadap satu konteks, bahwa keadilan terhadap anak-anak yatim lebih sentral daripada masalah poligami.³⁶

Adapun konteks lainnya, ungkap Asghar lebih lanjut, ayat itu turun setelah perang Uhud, ketika dalam perang ini 70 dari 700 laki-laki wafat. Akibatnya, banyak wanita Muslimah yang menjadi janda dan anak yatim, yang harus dipelihara. Berdasarkan konteks itu, jalan yang terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah menikahi mereka, dengan syarat harus adil. Oleh karena itu, pemahaman terhadap al-Nisā (4): 3, bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dalam konteks bukan untuk selamanya, tetapi bersifat temporal. Dengan demikian, ayat ini adalah termasuk ayat kontekstual yang pemberlakuannya bersifat temporal, bukan ayat universal, yang harus berlaku selamanya.³⁷

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Amina wadud, ayat poligami yakni al-Nisā (4): 3, pertama, ayat ini berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim tentang pengelolaan harta mereka yang diurus oleh wali. Wali ini harus mengurus dan mengelola kekayaan anak wanita yatim tersebut secara adil. Salah satu jalan pemecahan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan tersebut adalah dengan menikahnya. Kedua, ayat al-Nisā (4): 3 menekankan keadilan dalam hal; a) mengadakan perjanjian dengan adil, b) mengelola harta dengan adil, c) adil terhadap anak yatim, dan d) adil terhadap para istri.³⁸

Adapun alasan berpoligami dengan pandangan bahwa suami mampu secara finansial sedangkan si istri mandul, Amina menjawab bahwa banyak wanita yang tidak lagi membutuhkan pria untuk memenuhi kebutuhan finansial. Juga, tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an alasan kemandulan sebagai dasar untuk poligami. Jalan keluar untuk kasus mandul, ungkap Amina adalah dapat dengan cara mengangkat anak orang miskin atau anak yatim yang bapaknya wafat karena perang. Hubungan darah memang penting, tetapi bukan unsur penilaian tertinggi.

³⁶Asghar Ali Engineer, *Hak-hak...*, 142.

³⁷*Ibid.*, 30.

³⁸Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Rianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 111-112.

Oleh karena itu, alasan poligami sebagai pemuas seks jelas tidak sejalan dengan Al-Qur'an.³⁹

Ulama kontemporer lainnya, Fazlur Rahman mengatakan bahwa asas ideal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Pengakuan terhadap poligami merupakan bentuk perkawinan yang sifatnya kasuistik dan spesifik untuk menyelesaikan masalah yang ada ketika itu, yakni tindakan wali yang tidak rela mengembalikan harta anak yatim setelah anak yang ada di bawah perwaliannya cukup umur. Sebagai jalan keluarnya dibolehkan poligami dengan anak yatim tersebut daripada para wali menggunakan harta mereka dengan jalan yang tidak benar. Karena itu, dalam memahami al-Nisā (4):3 harus pula menghubungkannya dengan al-Nisā (4): 127-129 dan al-Nisā (4): 2.⁴⁰

Dengan menjadikan ayat-ayat tersebut menjadi satu kesatuan utuh dapat ditemukan jawaban bahwa poligami dibolehkan. Para laki-laki yang menjadi wali dapat menikahi para wanita yatim yang sudah cukup umur yang berada dalam perwaliannya maksimal empat. Tindakan ini dimaksudkan sebagai solusi terhadap penggunaan harta para anak yatim tersebut dengan jalan yang tidak halal. Tentu saja Al-Qur'an memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yakni harus dapat berlaku adil. Karena jika tidak mampu berlaku adil, cukup satu saja. Minimal jangan terlalu condong kepada salah satu atau sebagian yang mengakibatkan yang lain terabaikan berdasarkan al-Nisā (4): 129. Fazlur Rahman sendiri tidak setuju dengan formulasi para modernis yang menggunakan al-Nisā (4): 3 dan 129 sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, yakni dengan logika berpikir, Al-Qur'an membolehkan poligami dengan syarat berlaku adil, sedangkan seorang suami tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap para istrinya. Berdasarkan ungkapan tersebut menurut para modernis berarti Islam tidak membolehkan poligami. Secara substansi, Rahman setuju dengan pendapat tersebut, akan tetapi formulasi para modernis itu kurang meyakinkan, sebab dengan konsep demikian terkesan ditemukan kontradiksi dalam Al-Qur'an. Menurutnya, pandangan para modernis ini dapat diganti dengan ungkapan, bolehnya poligami hanya bersifat temporal, dan tujuan akhirnya adalah monogami. Pandangan ini sejalan dengan tujuan Al-Qur'an untuk menegakkan keadilan sosial di masyarakat, termasuk kepada kaum wanita.

³⁹Ibid., 112.

⁴⁰Fazlur Rahman, «The Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation», dalam *The Sparate Worlds: Studies of Purdah in South Asia*, ed. Hanna Papanek and Gail Minault (Delhi: Chanakya Publication, 1982), 228.

Dengan demikian, pengakuan dan kebolehan poligami hanyalah bersifat ad hoc, untuk menyelesaikan masalah yang ada ketika itu.⁴¹

Sementara itu, pemikir yang mengharamkan poligami misalnya al-Tahir al-Haddad. Setelah menghubungkan al-Nisā (4): 3 dengan al-Nisā (4): 129 dan al-Rūm (30): 21, ia berpendapat bahwa tujuan Al-Qur'an adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sementara dalam kenyataannya perkawinan poligami sulit-untuk mengatakan tidak mungkin- sekali menciptakan kehidupan yang harmonis dan tenteram antara suami dengan para istri dan anak-anak mereka. Apalagi jika harta peninggalan si suami ketika meninggal sangat terbatas akan mengakibatkan kesejahteraan para istri dan anak akan terbengkalai.⁴² Berbeda halnya dengan poligami yang dilakukan Nabi, ungkap Haddad, bukan tasyri' bagi umatnya. Poligami yang beliau lakukan adalah sebelum adanya tahdid (upaya pembatasan jumlah istri yang boleh dinikahi hanya maksimal empat orang).⁴³

Berdasarkan paparan di atas, secara umum terdapat tiga pandangan tentang poligami. Pertama, membolehkan poligami secara mutlak. Kelompok ini diwakili oleh kalangan fuqaha, seperti imam Syafi'i, Malik, Hanabilah, dan Hanafiyyah. Kedua, membolehkan poligami namun dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu, dan golongan ini diwakili oleh sebagian pemikir modern, seperti Quraish Syihab, Asghar Ali Engineer, Rahman, dan ketiga, melarang poligami secara mutlak, seperti pandangan al-Tahir al-Haddad.

D. Poligami Kaum Elit Agama: Plus-Minus dan Dampak Poligami Para Elit Agama Terhadap Masyarakat

Wacana seputar isu poligami tingkat elit agama (semisal kyai, tuan guru, ustadz, da'i, dan orang-orang yang dianggap memiliki posisi sentral pada masyarakat Islam) sangat penting untuk diperhatikan karena beberapa alasan. Pertama, sebagaimana penjelasan di awal, memang harus diakui bahwa dalam rekaman sejarah dan dokumentasi fiqih klasik, poligami sesungguhnya memiliki akar teologis dan legitimasi historis yang sama kuat. Akan tetapi, satu hal yang juga tak dapat dibantah bahwa dalam frame kehidupan kontemporer, praktik

⁴¹Ibid., 299.

⁴²Al-Tahir Al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri, Cet. IV (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 77.

⁴³Ibid, hlm. 79. Baca juga Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Ghuftron A. Mas'adi, buku ke-1 dan ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 47.

poligami mulai dianggap demikian problematik, bahkan rawan serta bukanlah cita-cita ideal perkawinan yang diharapkan dalam Islam. Di satu sisi, mayoritas umat Islam saat ini tidak bisa menerimanya sebagai praktik, namun di sisi lain ada keraguan bahkan ketidakberanian untuk menolak. Pada konteks demikian, beberapa kalangan bersikap abstain, tak menentukan pilihan dengan tanpa respon apa-apa, bahkan cenderung menghindar dari arus perdebatan. Sebagian muslim lain yang menyatakan menerima pun mengambil sikap dengan berlandung di balik slogan “meski boleh namun tidak berniat untuk mempraktikkan”.

Alasan kedua, bahwa kaum elit agama pada dasarnya mewakili kelompok *fiqih established* yang cenderung berpendapat bahwa agama bersifat universal dan final, tanpa merasa perlu melihat atau mempertimbangkan perubahan situasi zaman dan perkembangan kehendak masyarakat. Agama determinan atas sejarah, karena sejarahlah yang harus menyesuaikan diri terhadap agama sebagai aturan Tuhan, bukan sebaliknya, sebab Tuhan Maha Tahu apa yang sesungguhnya diperlukan oleh manusia dalam kehidupan sejarahnya. Pada tahap inilah, meminjam istilah Mahmud Muhammad Taha, tidak dibedakan antara *the first message of Islam* dan *the second message of Islam* (*ar-risalah ats-tsaniyah*).⁴⁴ Islam dianggap sebagai agama yang *taken for granted*, paket jadi yang bersifat gamblang, paripurna dan tidak boleh diganggu gugat.

Ketiga, karena posisi “khusus” kaum elit agama sebagai tokoh panutan sekaligus idola bagi masyarakat atau jamaahnya, maka bagaimanapun juga kaum elit agama sesungguhnya adalah *trend setter publik*. Bagi masyarakat dan jamaah yang senantiasa menghadiri dan mendengarkan perkataan-perkataan sang tokoh, misalnya, maka setiap nalar dan cara keberagamaan sang tokoh adalah model yang dijadikan panutan. Oleh karena itu, pola sikap dan perilaku sang tokoh (kaum elit agama) akan selalu menjadi konsumsi masyarakat. Dalam hal poligami misalnya, bagi yang setuju, maka praktik poligami yang dilakukan oleh seorang tokoh elit agama (kyai, tuan guru, ustadz, dan sebagainya) akan menjadi legitimasi yang kukuh sebagai sandaran untuk ikut mempraktikkan poligami, meskipun harus diakui seringkali masyarakat yang mengikuti dalam berbagai hal dan segi tidaklah sama dengan situasi dan keadaan sang tokoh yang diikuti, mulai dari pemahaman, kemampuan ekonomi, kesiapan mental, niat dan tujuan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, bagi yang tidak setuju, tentu saja poligami yang dilakukan oleh tokoh pujaannya menjadi “tamparan hebat” yang terus mengganggu pikiran bahkan

⁴⁴Gatot Suhirman, “Syariah Klasik dan Syariah Kontemporer: Sebuah Tatapan Evolusi Syariah untuk Islam Rahmatan Lil’alamin”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, edisi Juli-Desember 2009.

melukai perasaan. Akibatnya, banyak orang seperti sedang dituntun untuk menerima bahwa tidak semua ketentuan Tuhan memang selalu sejalan dengan kebutuhan pikiran dan perasaan manusia. Pada gilirannya, hal ini menggiring orang untuk menerima agama secara *taken for granted*. Sebagian kalangan lainnya bersifat apatis, skeptis, bahkan antipati.

Ilustrasi tepat untuk menggambarkan fenomena poligami tingkat elit agama misalnya seperti analisis yang dilakukan oleh Achmad Munjid seputar poligami yang dilakukan oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) beberapa waktu lalu:⁴⁵

“ Lebih dari sekadar dai kondang, dengan aneka kemasan rekaman, poster, buku, rupa-rupa aksesoris islami, penampilan televisi, dan pemberitaan media, kita tahu Aa Gym adalah seorang idola. Sebagaimana para bintang, ia adalah tokoh pujaan yang perilakunya terus diikuti aplaus atau helaan napas para pengagumnya. Ia adalah penghibur mata, penghibur telinga, dan lebih-lebih dengan “Manajemen Qalbu”-nya, ia terutama adalah penghibur hati, pelipur jiwa banyak orang.

Tapi mari kita tetap ingat, betapapun, ia adalah seorang manusia. Bukan dewa, bukan malaikat, bukan pula nabi. Kadang kita lupa, jika seseorang telah menjadi idola, *s/he can do no wrong*. Ia harus sempurna, apa pun tindakan dan perilakunya. Terhadap tindakan dan perilaku sang tokoh, kitalah yang berkewajiban menyesuaikan diri. Itu terjadi pada Soekarno, Soeharto, Gus Dur, dan banyak figur idola lainnya. Kini hal yang sama sedang berlangsung di sekitar Aa Gym.

Menyangkut perkara poligaminya, *with all due respect*, buat saya, apa yang dilakukan Aa Gym secara sosiologis tidak mendidik, secara teologis mandul, secara moral menyakitkan. Dalam istilah linguistik, paling jauh, ia mungkin secara gramatikal bisa diterima, *but he doesn't make sense*.”

Dalam kacamata Achmad Munjid, secara sosiologis, sebagai pemimpin yang dijadikan panutan banyak orang, mempraktekkan tindakan yang dari banyak segi jelas problematik amatlah tidak mendidik. Dengan begitu, bukan saja menampilkan bahwa agama adalah seperangkat dogma yang tak perlu ditanyakan, ia sama sekali tidak peka terhadap tuntutan perubahan kehidupan. Bahkan, menurutnya lebih lanjut, terlepas dari niat pribadinya yang mungkin saja tulus dan *lillahi ta'ala*, dengan berpoligami, sadar atau tidak, Aa Gym sebenarnya

⁴⁵Achmad Munjid, “Poligami Aa Gym”, dalam Koran Tempo, 8 Januari 2011.

telah terjat pada permainan kekuasaan patriarkis yang meminggirkan martabat kaum perempuan.⁴⁶

Jika diterima bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan, baik secara sosiologis maupun teologis, memang sederajat, tentu harus disepakati pula bahwa poligami bukanlah persoalan pribadi. Sebagai praktek sosial, ia adalah lembaga patriarkal yang memberikan privilese kuasa bagi laki-laki sembari menempatkan perempuan sebagai pihak yang kalah. Ketika asumsi “laki superior, perempuan inferior” telah diterima sebagai common sense, siapa saja yang “dilelakukan” dengan sendirinya memiliki privilese atas kuasa dan kebenaran. Sementara itu, siapa saja yang “diperempuankan” harus tunduk sebagai kaum lemah yang sewaktu-waktu siap sedia menjadi korban, menjadi tumbal.⁴⁷

Di sisi lain, bagi sebagian kalangan yang tidak setuju dengan poligami yang dilakukan para elit agama dapat dianggap sebagai bukti kemandulan teologis.⁴⁸ Sebab, dari sisi historis, konteks pembolehan poligami dalam Islam pada mulanya bertujuan justru untuk membatasi, bukan menambah jumlah istri. Sebab, dalam masyarakat Arab ketika itu, sebagaimana penjelasan yang dipaparkan sebelumnya, perempuan ibarat “obyek” yang boleh “diapasajakan” oleh laki-laki. Maka banyak orang, termasuk Umar ibn al-Khatab, sebelum menjadi muslim, tega mengubur bayinya yang terlahir perempuan. Di masa Arab jahiliyah, lazim diketahui orang bisa beristri berapa saja, siapa saja, asalkan mampu, asalkan bisa. Lalu Islam datang dengan aturan yang luar biasa modern untuk zaman saat itu, “jika terpaksa, maksimal empat”. Sebab, jamak diketahui bahwa poligami adalah model hubungan lelaki-perempuan yang turun-temurun diwarisi dari masyarakat Arab pra-Islam hingga di zaman Nabi Muhammad SAW telah berkembang demikian tak terkendali di tanah Arab. Oleh karena itu, Al-Quran kemudian mengembalikan tradisi itu kepada batas toleransi “maksimal empat”.

Namun demikian, jika dibaca kembali terutama QS al-Nisā : 3-4, jelas, “adil” menjadi kata kunci yang menyertai pembolehan poligami. Namun, sebagaimana ditegaskan juga dalam QS al-Nisā : 129, karena adil itu hampir mustahil bisa dicapai seorang suami beristri lebih dari satu, pada dasarnya monogami adalah bentuk hubungan sah lelaki-perempuan yang paling ideal dalam Islam. Artinya, dengan pesan universal yang bisa diterima pemahaman manusia dari berbagai latar budaya dan sejarah, dengan ketentuan “maksimal empat” itu, Al-Quran sebenarnya sedang

⁴⁶Ibid.

⁴⁷Ibid.

⁴⁸Ibid.

meletakkan fondasi penting buat kesederajatan lelaki-perempuan. Dengan “adil” sebagai hakikat pesannya, soal wujud hubungan legal itu selanjutnya diserahkan kepada kematangan umat Islam dalam mempraktekannya. Namun arahnya jelas, dari satu laki-laki dengan jumlah istri tak terbatas, menjadi maksimal empat istri, menuju monogami sebagai bentuk ideal.

“Budaya” Al-Qur’an yang bersifat membatasi semacam ini juga terjadi pada perkara perbudakan, misalnya. Islam tidak pernah terang-terangan melarang perbudakan. Tapi, dengan kesederajatan manusia sebagai prinsip kunci, dengan “membebaskan budak” sebagai bentuk penebusan kesalahan tertentu yang dilakukan seorang muslim, misalnya, di samping treatment lain yang menyangkut soal ini, arah yang ditempuh jelas: penghapusan perbudakan. Dengan demikian, setelah lima belas abad ditinggal Nabi Muhammad SAW., institusi perbudakan jelas tidak dapat diterima lagi oleh budaya masyarakat dunia saat ini.

Dari sudut pandang semacam ini, maka dapat disimpulkan bahwa poligami sudah bukan lagi menjadi problem solving sebagaimana diamanatkan Al-Qur’an terhadap masalah-masalah sosial seperti persoalan kemiskinan, ledakan penduduk dan bencana yang menyebabkan jutaan anak dan kaum perempuan terlunta di mana-mana. Sebab, yang jadi persoalan kemudian adalah jika demi mengurus anak yatim dan janda yang jadi pertimbangan pembolehan institusi poligami saat itu, bukankah solusi sistemik untuk problem-problem global seperti kemiskinan, ledakan penduduk, kelaparan, anak-anak terlantar dan kaum perempuan yang teraniaya saat ini justru lebih mendesak untuk dicari jalan keluarnya, dan itu tentu tidak akan bisa diselesaikan dengan hanya melakukan poligami. Lebih lanjut, harus diakui pula bahwa poligami sesungguhnya bukanlah urusan pribadi semata. Ini adalah persoalan sosial, perkara relasi kuasa yang timpang, masalah ketidakadilan atas kaum perempuan. Menggugat poligami dalam konteks masyarakat kontemporer saat ini bukanlah menentang ayat Tuhan, melainkan justru menerjemahkan pesan esensial Islam: keadilan semua pihak, bagi laki-laki dan perempuan, bagi suami maupun istri, juga anak-anak.

Di samping persoalan keadilan, dari sisi hukum status poligami minimal selalu diperdebatkan. Ini membuktikan bahwa poligami bukanlah praktik perkawinan yang dikehendaki oleh semua kalangan. Sikap terbaik yang dapat dilakukan di tengah-tengah perdebatan yang ada adalah dengan mengambil jalan terbaik yang memberikan pertimbangan konstruktif demi sampai pada tujuan ideal perkawinan yang sejak awal digariskan oleh Islam, yakni keadilan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak suami istri, yang justru tidak akan atau sulit dicapai melalui institusi

poligami. Dokumentasi hadis juga mengingatkan betapa tidak berkenannya Rasulullah SAW., saat Ali RA, menantu beliau, menunjukkan isyarat hendak mempoligami Fatimah, putri kesayangan Nabi SAW. Sembari berdiri di atas mimbar, Rasulullah berkata, “Aku tidak akan kasih izin, kecuali Ali ibn Abi Talib terlebih dulu menceraikan anak perempuanku jika ia mau mengawini anak-anak gadis mereka. Sebab, Fatimah adalah bagian dari tubuhku, aku membenci apa yang dia benci untuk dilihat, dan apa yang melukainya juga melukaiku”.⁴⁹

Sama dengan Nabi yang berbicara tentang Fathimah, hampir setiap orangtua tidak akan rela jika putrinya dimadu. Seperti dikatakan Nabi, poligami akan menyakiti hati perempuan, dan juga menyakiti hati orangtuanya. Jika pernyataan Nabi ini dijadikan dasar, maka bisa dipastikan yang sunnah justru adalah tidak mempraktikkan poligami karena itu yang tidak dikehendaki Nabi. Dan, Ali bin Abi Thalib RA sendiri tetap bermonogami sampai Fathimah RA wafat.

E. `Penutup

Sebagai epilog pembahasan dalam tulisan ini, maka dengan mempertimbangkan beberapa alasan dan dampak negatif yang demikian nyata akan ditimbulkan jika para elit agama berpoligami, maka sudah seharusnya poligami tidak menjadi pilihan perkawinan para kaum elit agama. Sebagai trend setter, idola dan panutan berjuta-juta jamaah masyarakat Islam, meski poligami diperkenankan secara teori, namun dari berbagai segi justru amat problematik jika harus dipraktikkan, maka institusi poligami sebagai bentuk perkawinan ternyata lebih menghadirkan permasalahan-permasalahan baru daripada memberi solusi kebahagiaan.

Dengan demikian, tepat apa yang dicatatkan oleh Imam al-Maraghi ketika memberikan tafsiran lebih lanjut bahwa kebolehan berpoligami dalam Islam sebagaimana yang disebut dalam surat al-Nisā itu, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan.⁵⁰ Al-Maraghi lalu mencatat kaidah fiqhiyyah dar’u al-mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat (yang lebih besar), berupa dampak negatif bagi masyarakat umum yang akan mencontoh perilaku dan praktik poligami kaum elit agama yang jadi panutan lebih didahulukan daripada

⁴⁹Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Vol. 7, Kitab 62, No. 157.

⁵⁰At Tabari, *Jami’ al Bayan fi Tafsir al Qur’an* (Beirut: Dar al Fikr, 1978), III: 577-578.

mengambil manfaat bagi kepentingan dan kemaslahatan pribadi elit agama itu sendiri. Akhirnya, poligami tingkat elit agama justru lebih problematis daripada memberi edukasi, apalagi solusi.

Daftar Pustaka

- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa Surah, al-Jami as-Shahih (Sunan at-Tirmizi), Beirut: Dar al-Fikr, t.t.. III.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-'Asy'as as-Sajastani, Sunan Abu Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, II.
- Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Achmad Munjid, "Poligami Aa Gym", dalam Koran Tempo, 8 Januari 2001.
- Aksin Wijaya, "Memahami Kembali Wahyu Tuhan (Pembacaan Hermeneutik atas Ayat-ayat Gender)", tesis sudah diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Amina Wadud Muhsin, Wanita di dalam Al-Qur'an, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- At Tabari, Jami' al Bayan fi Tafsir al Qur'an, Beirut: Dar al Fikr, 1978, III.
- Al-Tahir Al-Haddad, Wanita dalam Syariat dan Masyarakat, terj. M. Adib Bisri, Cet. IV, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Fazlur Rahman, "The Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation", dalam The Saporate Worlds: Studies of Purdah in South Asia, ed. Hanna Papanek and Gail Minault, Delhi: Chanakya Publication, 1982.
- Gatot Suhirman, "Syariah Klasik dan Syariah Kontemporer: Sebuah Tatapan Evolusi Syariah untuk Islam Rahmatan Lil'alam", Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, edisi Juli-Desember 2009.
- Hamim Ilyas, "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam", dalam Musawa, Vol. I No. I, Maret 2002.
- Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, alih bahasa Ghufroon A. Mas'adi, buku ke-1 dan ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin 'Isma'il bin Ibrahi Ibn Mugirah bin barzabah al-Bukhari al-Ja'fari, Sahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

- J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1990.
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Tazzafa Press, 2004.
- Maulana Wahidudin Khan, *Poligamy and Islam*, Delhi: The Islamic Centre, 1976.
- M. Matheruddin Siddiqi, *Women in Islam*, Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1993.
- Pius A. Partanto dan Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, t.t..
- Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Cet. IV, Beirut: Dar al-'Arabiyah, 1967.
- Safia Iqbal, *Women and Islamic law*, Delhi: ada Publisher and Distriboturs, 1994.
- Sayyid Amir Ali, *The Spirit of Islam: a History of Evolution and Ideal of Islam with a Life a Prophet*, India: Idarah Adabiyah, 1978.
- Wardian, "Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Tunisia (Studi atas Istinbath Hukum Larangan Poligami)", Tesis, tidak diterbitkan, pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006.